BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting dalam perekonomian suatu Negara. Kegiatan perdagangan internasional ini adalah kegiatan untuk memperdagangkan berbagai output berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara untuk dapat diperjualbelikan ke Negara lain. Kegiatan menjual barang ke luar negeri biasa dinamakan kegiatan ekspor, jika sebaliknya barang Negara lain yang masuk kenegara kita maka disebut dengan kegiatan impor. Apabila kegiatan ekspor lebih meningkat dibandingkan impor maka akan menghasilkan keuntungan bagi Negara namun apabila impor yang lebih besar dibandingkan ekspor maka akan menyebabkan penurunan pada neraca perdagangan.

Indonesia adalah salah Negara yang mengandalkan kegiatan perdagangan internasional sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Perdagangan internasional Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1980-an dimana pada saat itu ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditi migas. Selain komoditi migas, terdapat pula komoditi non-migas yang pada saat ini menjadi hal yang dominan bagi perkembangan ekspor Indonesia. Dalam ekspor non-migas, terdapat tiga sector penting yaitu industry, pertanian, dan pertambangan. Didalam sector pertanian, terdapat berbagai jenis komoditas salah satunya ialah hasil dari pertanian Indonesia ialah biji kakao.

Tabel 1.0 Ekspor 10 Komoditi Utama (Ribu US\$)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	TPT	13.256.791,8	12.468.384,2	12.683.713,5	12.742.635,1	12.284.963,1
1	111	13.230.791,8	12.406.364,2	12.065./15,5	12.742.055,1	12.204.903,1
2	Elektronik	10.840.685,0	10.727.404,5	9.666.295,7	9.294.658,3	8.231.238,4
3	Karet dan produk karet	14.352.238,2	10.475.150,6	9.394.177,4	7.100.023,1	5.913.509,6
4	Sawit	17.261.247,5	17.602.168,0	15.838.850,2	17.464.904,7	15.385.275,3
5	Produk hasil hutan (kayu&furniture)	8.922.837,1	8.799.757,2	9.043.477,2	9.293.110,4	9.008.276,4
6	Alas kaki	3.301.942,6	3.524.592,2	3.860.393,9	4.108.448,5	4.507.024,3
7	Otomotif	3.039.969,0	4.727.123,7	4.426.015,3	5.172.761,3	5.372.717,4
8	Udang	1.161.656,8	1.206.543,8	1.481.284,3	1.815.229,8	1.356.322,5
9	Kakao	1.135.992,7	833.141,8	993.072,7	1.095.237,9	1.146.928,3
10	Kopi	1.036.671,1	1.249.518,8	1.174.044,5	1.039.609,5	1.197.735,1
Total 10 komoditi utama		74.310.031,6	71.613.784,7	68.561.324,7	69.126.618,6	64.403.990,4
Total ekspor non migas		162.019.584,4	153.043.004,7	149.918.763,4	145.961.207,6	131.791.907,3

Sumber: www.kemendag.go.id

Terlihat pada tabel diatas, produk tekstil mengungguli pasar ekspor Indonesia mencapai angka 10 juta US\$ tiap tahunnya, selanjutnya ialah elektronik baik berupa komponen dan bagian elektronik ataupun alat cetak elektronik, selanjutnya ialah karet dan sawit, dan disusul oleh produk hasil hutan berupa kayu dan furniture, alas kaki,

otomotif, udang, dan selanjutnya ialah biji kakao, dan kopi. Terbukti melalui tabel tersebut bahwa Biji kakao termasuk dalam 10 komoditi utama yang menjadi komoditi yang di ekspor Indonesia. Indonesia dikenal sebagai Negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam, terutama dari hasil sector pertanian. Sector pertanian Indonesia menghasilkan berbagai jenis komoditas. Salah satunya komoditas hasil pertanian Indonesia adalah biji kakao. Sector pertanian kakao di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Biji kakao Indonesia sudah termasuk dalam komoditas andalan dalam kegiatan ekspor Indonesia karena selain komoditas ini memiliki keunggulan komparatif, biji kakao Indonesia juga memiliki beberapa kelebihan. Daerah penghasil kakao di Indonesia sebagian besar terdapat di pulau Sulawesi dan di provinsi Sumatera Utara, namun industry pengolahan kakao banyak terdapat di Pulau Jawa (Departemen Perindustrian, 2007).

Dilihat dari segi kualitas, biji kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao yang terdapat di Negara lain, cita rasa kakao yang berasal dari Ghana dengan kakao yang berasal dari Indonesia itu setara dan mereka tidak mudah meleleh (Departemen Perindustrian, 2007). Sejalan dengan keunggulan itu, peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Selain itu juga biji kakao berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan agrobisnis. Dengan kata lain, potensi untuk menggunakan industry kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan cukup terbuka. Berikut adalah Negara penghasil biji kakao terbesar didunia:

Tabel 1.1 10 Negara penghasil biji kakao terbesar di dunia

Peringkat	Negara	Kuantitas	Nilai	Unit Nilai
		(Dalam Ton)	(1000 USD)	(Ton/1000 USD)
1	Pantai gading	917.700	2.595.900	2.829
2	Ghana	498.308	1.151.370	2.311
3	Indonesia	439.305	1.087.490	2.475
4	Nigeria	247.000	599.000	2.425
5	Kamerun	193.973	540.281	2.785
6	Belanda	167.521	466.813	2.787
7	Ekuador	124.404	334.925	2.692
8	Togo	119.500	285.480	2.389
9	Belgia	97.578	296.651	3.04
10	Papua nugini	79.091	191.951	2.427

Sumber: Food and Agriculture Organization (FAO), 2009

Dapat dilihat pada tabel bahwa Pantai Gading menjadi salah satu negara yang menjadi penghasil biji kakao terbesar di dunia, disusul oleh Ghana dan Indonesia yang menjadi salah satu negara yang menghasilkan biji kakao terbesar di dunia, jumlah produksi kakao Indonesia diungguli oleh Pantai Gading, Afrika Barat, yang menghasilkan 917.700 ton dan Ghana, Afrika Barat yang menghasilkan 498.308 ton, jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat menguntungkan Indonesia dalam kegiatan ekspor. Indonesia sudah menjadi salah satu produsen utama biji kakao di dunia, sejak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pajak ekspor biji kakao yang bertujuan untuk mengembangkan industry pengolahan biji kakao, terdapat perubahan dalam ekspornya biji kakao. Biji kakao yang menjadi komoditas

pertanian yang berperan cukup penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber pendapatan dan devisa Negara (Departemen Perindustrian, 2007)

Perkembangan ekspor biji kakao dari Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagian besar biji kakao Indonesia di ekspor ke luar negeri. Besarnya permintaan ini berkaitan langsung dengan tingginya permintaan biji kakao dari industry coklat Negara anggota. Untuk memasok biji kakao, industry coklat juga telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh importer antara lain standar mutu biji, persyaratan kesehatan, lingkungan, dan yang paling penting dari seluruhnya ialah biji kakao tersebut haruslah di fermentasikan dan dijadikan serbuk yang disebut sebagai coklat bubuk. Coklat ini digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai macam produk makanan dan minuman. Buah coklat/kakao tanpa biji dapat di fermentasikan untuk dijadikan pakan ternak. Dari biji kakao tersebut, dapat diproduksi empat jenis produk kakao setengah jadi yaitu, cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake dan cocoa powder.

Sebagian besar kakao Indonesia diekspor ke luar negeri dan empat Negara tujuan ekspor terbesar adalah Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu. Selama beberapa tahun terakhir, komoditi biji kakao dari Indonesia mulai mengalami penurunan yang signifikan di berbagai Negara. Berikut tabel jumlah ekspor biji kakao menurut negara tujuan:

Tabel 1.2 Ekspor Biji Kakao Menurut Negara Tujuan Utama (Ton)

No	Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Malaysia	203,847.7	143,296.0	102,350.1	134,774.4	43,733.0	33,735.8
2	Singapura	53,9333.3	34,839.4	40,879.4	33,146.9	10,617.1	5,850.0
3	Amerika Serikat	89,306.5	9,841.0	143.3	7,208.7	218.9	1,823.1
4	Tiongkok	15,394.9	8,764.2	6,962.1	8,670.2	480.0	683.3
5	Jerman	12,336.5	293.8	369.8	490.5	600.7	2,103.3
6	Thailand	6,716.3	6,037.0	8,049.4	7,713.4	4,978.5	1,378.1
7	Belanda	5,847.5	776.0	510.6	187.5	237.5	608.7
8	India	4,055.5	4,848.0	5,131.0	5,700.0	7,820.1	55.0
9	Kanada	3,500.0	5,500.0	25.5	118.2	120.8	36.1
10	Lainnya	38,690.1	543.9	7,565.1	3,494.9	7,819.3	9,026.0
	Jumlah	433,628.3	214,739.3	171 <mark>,</mark> 986.3	201,504.7	76,625.9	55,299.4

Sumber: www.bps.go.id

Pada tabel diatas Malaysia menjadi negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia, selanjutnya Singapura dan Amerika Serikat, lalu Tiongkok, Jerman, Thailand, Belanda, India, dan Kanada. Ekspor yang terjadi tiap tahunnya tidak menentu bahkan terlihat terjadi penurunan ekspor biji kakao indonesia ke berbagai Negara menimbulkan banyak gejolak sedangkan pada periode tahun sebelumnya kegiatan ekspor biji kakao Indonesia mengalami kenaikan hingga tahun 2010 dan mulai mengalami ketidakstabilan pada tahun 2011-2015. Penurunan yang amat drastic terlihat pada ekspor biji kakao Indonesia ke Malaysia yang berawal dengan angka ratusan juta ribu ton menjadi hanya puluhan ribu ton saja. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan perlu di perhatikan secara saksama mengenai permasalahan yang ada di Indonesia serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut.

I. 2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penerapan Tariff Bea Keluar Biji Coklat/Kakao ke Malaysia Periode 2011-2015?

I. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

- Untuk mengetahui dan memahami situasi dan kondisi Pertanian Indonesia khususnya dalam komoditi biji kakao
- Untuk memahami kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke Malaysia
- Untuk menganalisa kebijakan Indonesia dalam penerapan tariff bea keluar biji kakao ke Malaysia

I. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan memberikan gambaran mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Negara lain.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Hubungan Internasional mengenai kegiatan Perdagangan Internasional serta menganalisa kebijakan Indonesia dalam menerapkan tariff bea keluar biji kakao ke Malaysia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis jadikan tinjauan antara lain buku yang berjudul "Gambaran Sekilas Industri

Kakao" yang di tulis oleh **Departemen Pertanian** yang menjelaskan mengenai kondisi serta potensi lahan Indonesia, industry kakao, pasar kakao baik untuk dalam maupun luar negeri serta membandingkannya dengan nilai perdagangan kakao Indonesia dan dunia. Buku ini memberikan informasi kepada penulis mengenai berbagai aspek, seperti peluang investasi industry berbasis kakao baik pada usaha hulu, hilir, produk samping, serta infrastruktur yang mendukung bisnis tersebut. Selain itu, buku ini juga dapat membantu penulis dalam menjelaskan mengenai peluang biji kakao Indonesia untuk bisa bersaing di dunia internasional. Dan memberikan gambaran tentang industry kakao yang berada di Indonesia

Tinjauan pustaka yang kedua ialah skripsi yang berjudul "Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Produk Olahan Kakao ke Eropa Periode 2009-2014" yang ditulis oleh Tania Ramadhini. Penelitian ini secara umum membahas mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan ekspor biji kakao ke Uni Eropa. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa kakao Indonesia mengalami diskriminasi oleh Negara-negara pengimpor kakao diantaranya Uni Eropa yang mengenakan tariff yang tinggi terhadap kakao asal Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan berbagai upaya terhadap Uni Eropa untuk menghapus diskriminasi tariff bea masuk kakao olahan sehingga Indonesia, Pantai Gading, dan Ghana berada dalam level persaingan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dengan cara diplomasi dan bergabung dengan organisasi nasional maupun internasional untuk meningkatkan ekspor produk olahan kakao Indonesia. Skripsi ini dapat membantu penelitian penulis dalam hal bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor biji kakao serta dapat menambah pengetahuan penulis mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses ekspor biji kakao Indonesia.

Tinjauan pustaka yang ketiga ialah tesis yang ditulis oleh **Farida Millias Tuty** yang berjudul **"Analisis Permintaan Ekspor Biji Kakao Sulawesi Tengah Oleh Malaysia"** yang menganalisis mengenai permintaan ekspor biji kakao Sulawesi Tengah oleh Malaysia. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah permintaan ekspor bij kakao Sulawesi Tengah oleh Malaysia mengalami fluktuasi dengan tingkat

inflasi Malaysia relatih rendah, nilai tukar rupiah juga cenderung mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika Serikat. Biji kakao merupakan salah satu komoditi yang mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah merupakan daerah kedua di Indonesia setelah Sulawesi Selatan sebagai penghasil kakao terbesar di Indonesia. Tesis ini memberikan gambaran sekilas mengenai kerjasama dan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia dalam kegiatan ekspor biji kakao Indonesia serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan bilateral kedua Negara tersebut.

I. 6 Kerangka Pemikiran

I. 6. 1 Perdagangan Internasional

Perdagangan adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Dalam perdagangan domestic para pelaku ekonomi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktifitas ekonomi yang dilakukan. Demikian halnya dengan perdagangan internasional. Suatu perdagangan internasional terjadi dikarenakan adanya kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi serta mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan yang lebih. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas Negara, mencakup ekspor impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang dan perdagangan jasa. Menurut Adam Smith, perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua Negara jika masingmasing Negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Dengan demikian, bila hanya satu Negara yang memiliki keuntungan mutlak untuk kedua jenis produk misalnya, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan.

Walter S. Jones dalam buku Logika Hubungan Internasional, menurut pandangannya, perdagangan internasional merupakan kegiatan internasional yang mencerminkan interdependensi antar Negara, tanpa menghiraukan banyak perbedaan politik diantara mereka. Selain perdagangan internasional, jenis perdagangan yang ada antara lain, adalah perdagangan multilateral dan perdagangan bilateral. Menurut Erizal Mahatama, perdagangan bilateral mengacu kepada perjanjian pertukaran antar dua pihak. Secara teknis, pertukaran antara berbagai pihak dapat dianggap sebagai

perdagangan bilateral. Maka dalam penelitian ini, menunjukkan adanya kegiatan perdagangan bilateral terjadi antara Indonesia-Malaysia.

I. 6. 2 Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam melaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Mustopadijaja menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim di gunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut di tuangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. (Nurcholis, Hanif, hlm: 263)

Menurut William N. Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: "Public Policy is whatever the government choose to do or not to do" (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya. (Lembaga Administrasi Negara, 2008)

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: "Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society". (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat). James E. Anderson mengatakan Public policies are those policies developed by governmental bodies and official (kebijakan negara adalah kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Anderson implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah: Bahwa kebijakan negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu. Anderson mengatakan ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

James L. Anderson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan public sebagai berikut:

- a) Substantive and Procedural Policies
 - Substantive policy, merupakan kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di hadapi oleh pemerintah. Misal: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain
 - Procedural Policy, merupakan kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlihat dalam perumusannya (Policy Stakeholders). Sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undangundang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah ataupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Hukum & HAM, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Presiden yang

mengesahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/organisasiorganisasi yang terlibat tersebut disebut policy Stakeholders.

- b) Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.
 - Distributive Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/ keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Contoh: kebijakan tentang "Tax Holiday"
 - Redistributive Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
 - Regulatory Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
- c) Material Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh: kebijakan pembuatan rumah sederhana.
- d) Public Goods and Private Goods Policies.
 - Public Goods Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barangbarang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak. Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum.
 - Private Goods Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barangbarang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan. Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang /pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel dan lain-lain.

Maka, melalui berbagai paparan di atas mengenai kebijakan. Menurut penulis, teori kebijakan ini mampu membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengenaan tariff bea keluar biji kakao ke Malaysia periode 2011-2015 serta bagaimana kebijakan tersebut mampu

membantu menyelesaikan permasalahan mengenai penurunan ekspor yang dialami oleh Indonesia khususnya untuk negara tujuan Malaysia.

I. 7 Alur Pemikiran



I. 8 Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa:

- 1. Terjadinya penurunan ekspor biji kakao Indonesia ke Malaysia
- 2. Peningkatan mutu serta kualitas biji kakao Indonesia harus dilakukan agar kegiatan ekspor Indonesia semakin meningkat.
- 3. Dengan adanya kebijakan mengenai penetapan tariff bea keluar biji kakao diharapkan Indonesia mampu mengembangkan industry pengolahan kakao dalam negeri dan menjamin ketersediaan bahan baku nasional serta meningkatkan kegiatan ekspor biji kakao.

I. 9 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata "methodos" yang terdiri dari kata "metho" yaitu melewati, menempu atau melalui dan kata "hodos" yang berarti cara atau jalan. Metode artinya adalah cara atau jalan yang dilalui atau ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Metetologi berasal dari bahasa Yunani yaitu "methodos" dan "logos". Kata "logos" berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Jadai metedologi adalah ilmu atau cara yang digunakan penelususran dengan urutan atau tatacara tertentu sesuai dengan apa yangakan dikaji atau diteliti secara ilmiah.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. (Moleong, 2011). Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana kebijakan Indonesia dalam penerapan tariff bea keluar biji kakao ke Malaysia.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis data yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan. Data-data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari dokumen dan website resmi dari Kementrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, media elektronik, jurnal, dan buletin.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah Telaah Pustaka (Library Research), yaitu dengan cara pengumpulan data baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selain itu, teknik wawancara juga akan digunakan dalam melengkapi penelitian penulis.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data sehingga suatu permasalahan di jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. (Moleong, 2011). Analisi data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I. 10 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan membaginya berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA EKSPOR KAKAO INDONESIA

Bab ini berisikan mengenai kegiatan produktivitas komoditi biji kakao di Indonesia. Dalam bab ini akan membahas mengenai seberapa banyak biji kakao yang di produksi oleh Indonesia serta kegiatan ekspor biji kakao ke Malaysia.

BAB III KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENETAPAN TARIFF BEA KELUAR BIJI KAKAO

Bab ini menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penetapan tariff bea keluar produk biji kakao untuk di ekspor ke Malaysia. Dalam bab ini akan di bahas pula mengenai standar mutu biji kakao Indonesia di pasar Internasional. Selain itu juga dampak dari penetapan tariff bea keluar tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna sebagai masukan terkait permasalahan tersebut.